



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Integrasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Keimigrasian

Integration of Information Technology in the Management of State Assets in the Immigration Environment

Diskara Tempati^{1*}, Hanif Yudha Pratama², Muhammad Farhan³, Farrel Muhammad⁴, Kevin Suherman⁵, Nurul Maharani Piranti⁶

¹Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Fakultas Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, diskaratempati241@gmail.com

²Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Fakultas Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, hanifpratama503@gmail.com

³Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Fakultas Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, farhanrifa26@gmail.com

⁴Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Fakultas Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, farrelmuhammad98@gmail.com

⁵Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Fakultas Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, kevinsuherman27@gmail.com

⁶Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian, Fakultas Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, nurulpiranti20@gmail.com

***Corresponding Author: diskaratempati241@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Aug, 2025

Revised: 27 Sep, 2025

Accepted: 11 Oct, 2025

Kata Kunci:

Barang Milik Negara (BMN), Teknologi Informasi, Manajemen Aset, Keimigrasian, Akuntabilitas

ABSTRAK

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang mendukung fungsi pemerintahan termasuk dalam bidang keimigrasian. Di lingkungan keimigrasian, BMN di lingkungan keimigrasian sendiri berupa gedung kantor, perangkat teknologi layanan paspor, hingga kendaraan dinas memiliki peran vital dalam menunjang fungsi pelayanan publik, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun, pengelolaan BMN sendiri masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti perbedaan data administrasi dengan kondisi fisik, aset yang tidak termanfaatkan, hingga kendaraan dinas yang hilang atau digunakan tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini membahas integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan BMN di unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian sebagai solusi peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dari laporan pemerintah, literatur akademik, dan berita terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi, seperti SIMAK-BMN dan SAKTI, serta inovasi teknologi berupa GPS tracking, QR code, dan dashboard monitoring mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN. Meskipun terdapat tantangan

berupa keterbatasan SDM, infrastruktur, dan resistensi budaya kerja di masa depan sangat potensial untuk memperkuat sistem manajemen aset negara di lingkungan keimigrasian.

Keywords:

State-Owned Assets (BMN), Information Technology, Asset Management, Immigration, Accountability.

DOI: 10.56338/jks.v8i10.8686

ABSTRACT

The management of State-Owned Assets (BMN) is a fundamental aspect of governance that supports governmental functions, including in the field of immigration. Within the immigration environment, BMN such as office buildings, passport service technology devices, and official vehicles play a vital role in supporting the functions of public service, supervision, and law enforcement. However, the management of BMN still faces a number of problems, such as discrepancies between administrative data and physical conditions, underutilized assets, and official vehicles that are lost or used improperly. This research discusses the integration of information technology in the management of BMN at immigration technical implementation units (UPT) as a solution to increase transparency, efficiency, and accountability. The research method uses a descriptive qualitative approach with secondary data analysis from government reports, academic literature, and current news. The results show that the implementation of information systems, such as SIMAK-BMN and SAKTI, as well as technological innovations like GPS tracking, QR codes, and monitoring dashboards, can improve the effectiveness of BMN management. Despite challenges such as limited human resources, infrastructure, and resistance from the work culture, there is significant potential to strengthen the state asset management system within the immigration environment in the future.

PENDAHULUAN

Barang Milik Negara (BMN) adalah salah satu instrumen penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BMN diartikan sebagai seluruh barang yang dibeli atau didapatkan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau diperoleh dari sumber sah lainnya. Dalam konteks keimigrasian, BMN mencakup aset yang sangat beragam, mulai dari Gedung, kantor pelayanan keimigrasian, rumah dinas pegawai, kendaraan operasional, perangkat teknologi layanan paspor, sistem IT pendukung perlintasan orang, hingga peralatan untuk pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Aset-aset ini berperan tidak hanya sebagai sarana penunjang administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mempertahankan kedaulatan negara melalui kontrol lalu lintas orang di perbatasan, bandara, dan pelabuhan.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan BMN masih mengalami berbagai hambatan. Permasalahan seperti ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik, aset yang tidak digunakan secara optimal, serta minimnya pengawasan dan perawatan terus berulang. Kasus kendaraan dinas yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, seperti yang ditemukan oleh BPK di beberapa pemerintah daerah, menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam tata kelola aset publik. Misalnya, laporan BPK pada tahun 2024 mengungkap 635 kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Bekasi tidak diketahui keberadaannya dengan nilai aset mencapai lebih dari Rp61 miliar. Fenomena serupa berpotensi juga terjadi di instansi pusat, termasuk di lingkungan keimigrasian, apabila mekanisme pengelolaan tidak diperkuat.

Kementerian Hukum dan HAM, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya, sejatinya telah mngambi berbagai langkah pengawasan, seperti apel

kendaraan dinas yang secara berkala dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian jumlah, kondisi, dan pemanfaatan kendaraan. Sebagai contoh, Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau pada tahun 2023 mencatat sejumlah 25 kendaraan roda empat (dengan status berbeda: dinas jabatan, operasional, dalam proses penghapusan, dan sewa) serta 11 kendaraan roda dua yang semuanya diperiksa dalam apel kendaraan dinas (Kanwil Kemenkumham Kepri, 2023). Praktik ini menekankan pentingnya pengawasan fisik sebagai langkah fundamental dalam pengelolaan aset aset.

Namun, di tengah era digital dan tuntutan tata kelola yang baik, pengelolaan aset yang hanya bergantung pada pemeriksaan fisik sudah tidak lagi memadai. Transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi hanya dapat tercapai apabila sistem pengelolaan BMN beralih ke integrasi teknologi informasi (TI). Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebenarnya telah memperkenalkan sistem digital seperti SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Kedua aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan data aset negara dengan lebih akurat, memudahkan pemantauan, serta mengurangi potensi manipulasi laporan.

Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan BMN juga memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik keimigrasian. Misalnya, apabila kendaraan dinas operasional tercatat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, maka mobilitas petugas dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, penindakan keimigrasian, atau penguatan layanan paspor di daerah terpencil dapat lebih terjamin. Dengan kata lain, pengelolaan aset yang efektif tidak hanya berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga berkontribusi membangun citra institusi imigrasi sebagai penyelenggara pelayanan publik yang profesional dan modern.

Lebih jauh, integrasi TI dalam pengelolaan BMN juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menutup ruang penyalahgunaan wewenang dan praktik pada birokrasi yang tidak efisien. Dengan adanya sistem digital, proses pelaporan tidak lagi bergantung pada subjektivitas pegawai, melainkan berbasis data riil yang dapat diaudit secara jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari reformasi birokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan integrasi teknologi informasi dapat memperkuat pengelolaan BMN di lingkungan keimigrasian. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas sistem digital (SIMAK-BMN, SAKTI, dan aplikasi monitoring lainnya), manfaat yang diperoleh, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis untuk upaya modernisasi pengelolaan aset negara di sektor keimigrasian.

TINJAUAN PUSTAKA

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset yang dimiliki dan dikuasai negara yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber sah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Keberadaan BMN bukan hanya sekadar barang yang dimanfaatkan sebagai pendukung untuk operasional pemerintahan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab negara dalam mengelola kekayaan publik secara profesional dan akuntabel. Dalam sektor keimigrasian, BMN memiliki posisi strategis karena mendukung tiga fungsi utama imigrasi, yakni pelayanan publik, pengawasan, dan penegakan hukum. Contoh BMN di sektor ini mencakup gedung kantor, peralatan teknologi informasi untuk pelayanan paspor dan visa, serta kendaraan dinas yang digunakan untuk pengawasan dan penindakan.

Menurut Mardiasmo (2018), pengelolaan BMN harus selaras dengan prinsip good governance, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan BMN sering menghadapi masalah serius. Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) dalam berbagai laporan menemukan adanya ketidaksesuaian data antara pencatatan administrasi dengan kondisi fisik di lapangan, aset yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan, hingga kasus kendaraan dinas yang hilang atau digunakan tidak sesuai ketentuan. Kasus kehilangan lebih dari 600 kendaraan dinas di Pemerintah Kota Bekasi (RRI, 2024) menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan aset negara.

Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah telah mendorong penerapan integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan BMN. Aplikasi SIMAK-BMN dan SAKTI berfungsi sebagai alat utama dalam pencatatan dan pelaporan aset secara digital. Berdasarkan laporan DJKN (2022), sistem ini telah meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan memperbaiki akuntabilitas pengelolaan BMN. Lebih jauh, pemanfaatan teknologi lain seperti GPS tracking untuk kendaraan dinas, QR code untuk inventarisasi peralatan, serta dashboard monitoring berbasis internet memungkinkan pemantauan aset secara real-time.

Penelitian terdahulu juga mendukung urgensi transformasi digital ini. Rohman (2021) menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan aset negara dapat mengurangi risiko kehilangan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat pengawasan. OECD (2020) bahkan menyoroti bahwa digitalisasi aset publik di berbagai negara anggota telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses audit, dan mengurangi biaya pemeliharaan aset. Namun demikian, implementasi teknologi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, infrastruktur jaringan yang belum merata di daerah perbatasan, serta resistensi budaya kerja birokratis.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena tujuan utama kajian adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan keimigrasian, khususnya terkait pemanfaatan kendaraan dinas serta integrasi teknologi informasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena yang ada, sedangkan metode deskriptif digunakan agar penelitian dapat menyajikan kondisi aktual, masalah, serta potensi solusi yang dapat diterapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, literatur akademik, laporan instansi, serta publikasi media. Sumber utama meliputi peraturan perundang-undangan terkait BMN, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan, serta regulasi teknis DJKN dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, data juga diperoleh dari laporan tahunan DJKN, laporan keuangan Kemenkumham, ikhtisar hasil pemeriksaan BPK, serta artikel ilmiah dan jurnal yang membahas pengelolaan aset negara. Beberapa kasus aktual, seperti temuan kendaraan dinas yang tidak tercatat atau tidak dimanfaatkan secara optimal di beberapa instansi pemerintah, juga dijadikan rujukan untuk memperkaya pembahasan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan cara menelaah berbagai literatur, dokumen resmi, serta publikasi yang relevan untuk memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan laporan tahunan, hasil audit, dan publikasi resmi dari instansi yang bersangkutan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama seperti permasalahan pengelolaan BMN, pengawasan kendaraan dinas, pemanfaatan teknologi informasi, serta kendala dalam penerapan digitalisasi.

Dalam menganalisis temuan, penelitian ini memanfaatkan kerangka teori yang relevan, antara lain Teori Akuntabilitas Publik yang menekankan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset negara, Teori Manajemen Aset yang membahas prinsip efektivitas dan efisiensi pemanfaatan BMN, serta Technology Acceptance Model (TAM) yang digunakan untuk menilai penerimaan teknologi informasi dalam proses birokrasi. Dengan memanfaatkan teori-teori ini, penelitian tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena, tetapi juga memberikan analisis konseptual tentang bagaimana integrasi teknologi informasi dapat meningkatkan pengelolaan BMN.

Sebagai batasan penelitian, kajian ini difokuskan pada lingkungan keimigrasian dengan objek utama berupa kendaraan dinas sebagai salah satu kategori BMN bergerak yang paling rentan terhadap masalah inventarisasi, pemanfaatan, dan pengawasan. Penelitian juga terbatas pada penggunaan data sekunder, sehingga hasilnya bersifat analitis-konseptual dan deskriptif, bukan temuan empiris lapangan. Meskipun demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh sekaligus rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN melalui pemanfaatan teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam sektor keimigrasian menunjukkan pola masalah yang mirip dengan temuan di instansi publik lain. Terjadi ketidaksesuaian antara catatan administrasi dengan kondisi fisik aset, distribusi aset yang tidak proporsional antar unit, serta proses penghapusan dan pemeliharaan yang terlambat sehingga menimbulkan beban biaya dan risiko audit. Fenomena ini tidak hanya bersifat teoritis; praktik pengawasan fisik seperti apel kendaraan dinas yang dilakukan oleh beberapa Kanwil menunjukkan upaya mitigasi operasional, sementara temuan audit public (mis. kasus ratusan kendaraan dinas yang statusnya tidak jelas pada Pemkot Bekasi) menegaskan konsekuensi nyata dari tata kelola aset yang lemah. Temuan-temuan tersebut menegaskan urgensi modernisasi manajemen aset yang tidak boleh hanya bergantung pada pemeriksaan fisik dan catatan manual saja.

Salah satu landasan teknis untuk modernisasi adalah aplikasi pencatatan dan akuntansi BMN yang telah dikembangkan pemerintah, di antaranya SIMAK-BMN untuk manajemen aset dan SAKTI untuk integrasi proses keuangan dan pelaporan. Sistem-sistem ini secara konsep memungkinkan pencatatan terpusat, sinkronisasi nilai dan kondisi aset, serta penyusunan laporan keuangan yang konsisten. Implementasi yang baik dari SIMAK-BMN/SAKTI akan mengurangi duplikasi data, mempermudah rekonsiliasi aset antar unit, dan menyediakan audit trail yang kuat untuk pemeriksaan internal dan eksternal. Oleh sebab itu, penguatan pemanfaatan dan pengintegrasian kedua sistem ini merupakan langkah teknis primer dalam setiap rencana modernisasi BMN.

Di tingkat operasional, integrasi teknologi yang lebih pragmatis seperti instalasi GPS tracking pada kendaraan dinas, penggunaan QR/Barcode untuk penggunaan inventarisasi peralatan, dan penerapan dashboard monitoring memberikan manfaat yang jelas. GPS memungkinkan verifikasi rute, jam penggunaan, dan pola penggunaan sehingga dapat mendeteksi penyalahgunaan. QR/Barcode mempercepat proses inventarisasi fisik dan memudahkan verifikasi saat apel. dashboard terpadu menyajikan indikator kinerja aset (mis. status aktif, lokasi, jadwal perawatan) yang dapat diakses pimpinan untuk pengambilan keputusan cepat. Kombinasi fitur-fitur ini menghubungkan data operasional harian dengan data akuntansi yang tersimpan di SIMAK-BMN/SAKTI, menjadikan inventarisasi dan pelaporan menjadi lebih terintegrasi dan real-time. pelaksanaan teknis seperti ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai kerangka transformasi digital layanan publik.

Manajemen pemeliharaan juga mendapat manfaat langsung dari digitalisasi. Jadwal servis dapat dikelola otomatis, notifikasi perawatan berkala dikirimkan ke pengguna terkait, dan riwayat perbaikan tercatat sehingga memudahkan pengambilan keputusan penghapusan atau penggantian aset berdasarkan data biaya dan manfaat. Pendekatan predictive maintenance yang didasarkan pada data penggunaan (mis. jarak tempuh, frekuensi pemakaian) dapat menurunkan frekuensi kerusakan mendadak dan total cost of ownership kendaraan dinas. Namun, agar manfaat ini terwujud, integrasi data operasional (GPS, log servis) dengan modul aset di SIMAK-BMN harus difasilitasi baik secara teknis (API/integrasi data) maupun administratif (SOP pelaporan servis dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang). Kasus gangguan/maintenance pada aplikasi SAKTI yang kadang terjadi juga menunjukkan perlunya mekanisme fallback dan kapasitas TI yang andal untuk memastikan operasi tidak terganggu dan tetap berjalan.

Dari sisi teori, struktur akuntabilitas publik dan manajemen aset menjelaskan bahwa digitalisasi bukanlah tujuan akhir melainkan sarana untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Menurut perspektif manajemen aset, siklus hidup aset harus dikelola mulai perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, perawatan hingga penghapusan dan setiap tahap harus didukung oleh data yang akurat. Sementara itu, Technology Acceptance Model (TAM) menekankan bahwa keberhasilan sistem bergantung pada persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan oleh pegawai. Tanpa dukungan pegawai, sistem canggih akan tetap tidak efektif dan berfungsi. Oleh karena itu, intervensi teknis perlu disertai strategi perubahan manajemen, pelatihan, insentif kepatuhan, dan pelibatan pengguna akhir dalam desain sistem agar kegunaan dan kemudahan penggunaan dapat tercapai.

Meski potensinya besar, hambatan implementasi cukup nyata dan perlu dianalisis secara pragmatis. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia baik kemampuan SDM TI maupun kesadaran manajerial menjadi penghambat utama adopsi sistem. Kedua, infrastruktur jaringan yang belum merata, khususnya UPT di wilayah perbatasan atau terpencil, menghambat kemampuan monitoring real-time. Ketiga, resistensi birokrasi dan kebiasaan kerja manual dapat menunda migrasi penuh ke sistem digital. Keempat, aspek anggaran memiliki dua sisi, kebutuhan investasi awal untuk perangkat keras, lisensi, dan integrasi, serta biaya berkelanjutan untuk pemeliharaan sistem. Kondisi-kondisi ini memerlukan pendekatan bertahap dan rencana bisnis yang realistis agar transformasi tidak berhenti di tahap percobaan. Indeks SPBE nasional yang meningkat menunjukkan arah positif, namun capaian indikator ini belum menjamin kesiapan seluruh unit operasional. Oleh karena itu, strategi implementasi perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat sejumlah rekomendasi operasional yang konkret dan bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan UPT imigrasi. Pertama, lakukan rekonsiliasi awal. Audit fisik terpadu antara catatan SIMAK-BMN/SAKTI dan kondisi lapangan sebagai baseline data, lalu jadwalkan apel fisik rutin untuk memastikan keberlanjutan. Kedua, prioritaskan integrasi teknis, bangun API atau mekanisme sinkronisasi antara modul aset (SIMAK) dan modul keuangan (SAKTI) serta platform monitoring kendaraan (GPS) agar data pemakaian secara otomatis mengupdate status aset. Ketiga, merancang SOP operasional baru yang mengatur pendaftaran aset, penggunaan kendaraan (mis. buku perintah tugas digital), pelaporan kerusakan, dan proses penghapusan berbasis data. SOP ini perlu dilengkapi sanksi tegas untuk penyalahgunaan aset. Keempat, mengembangkan program pelatihan berjenjang untuk Kuasa Pengguna Barang, bendahara, dan admin TI agar aspek TAM manfaat yang dirasakan & Kemudahan Penggunaan) dapat terpenuhi. Kelima, mulai dengan pilot yang terukur (misal 3-5 UPT) sebelum skala nasional, untuk mengevaluasi dan menilai aspek teknis, biaya, dan dampak pada pelayanan. Konsep-konsep tersebut sejalan dengan pedoman SPBE dan praktik good governance yang direkomendasikan instansi pusat.

Untuk jangka menengah dan panjang, arah pengembangan teknologi perlu mempertimbangkan integrasi yang lebih maju. Pemanfaatan big data analytics untuk memprediksi kebutuhan alokasi kendaraan berdasarkan pola layanan, adopsi IoT untuk monitoring kondisi teknis (mis. suhu mesin, tekanan ban), serta eksplorasi blockchain untuk jejak audit yang sulit dimanipulasi terkait transaksi pemindahtanganan atau penghapusan aset. Namun, teknologi lanjutan hanya relevan bila fondasi data bersih, tata kelola prosedural, dan kapasitas SDM sudah kuat. Tanpa itu, investasi lanjutan berisiko menjadi Pengeluaran tanpa dampak. Oleh karena itu, roadmap transformasi harus memprioritaskan kualitas data, integrasi sistem dasar (SIMAK-BMN/SAKTI dan sistem monitoring), dan pengembangan SDM sebelum beralih ke solusi canggih.

Untuk memastikan agar pengukuran keberhasilan dapat objektif, diperlukan indikator-indikator evaluasi yang jelas. Persentase aset yang terverifikasi secara fisik terhadap catatan SIMAK, frekuensi dan tingkat kepatuhan servis berkala, jumlah temuan audit BPK terkait aset per tahun, rasio utilisasi kendaraan (jam operasi per hari atau km per bulan), dan evaluasi kepuasan pengguna layanan operasional. Pengukuran kuantitatif ini akan memungkinkan analisis cost-benefit dari investasi TI (seperti biaya instalasi GPS dibandingkan dengan penghematan perbaikan dan pengurangan penyalahgunaan). Selain itu, disarankan melakukan studi lapangan kuantitatif seperti melaksanakan pengguna kendaraan dinas dan analisis data pemakaian agar asumsi dalam kajian ini dapat diuji secara empiris.

Secara ringkas, pembahasan ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi adalah solusi praktis dan strategis untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan BMN di lingkungan keimigrasian, namun keberhasilan implementasinya bergantung pada kualitas data awal, kesiapan SDM, dukungan infrastruktur, dan aturan tata kelola yang jelas. Langkah-langkah bersifat bertahap, rekonsiliasi data, integrasi teknis dasar, SOP baru, pelatihan, pilot, lalu skala adalah pendekatan paling realistis untuk menjamin bahwa digitalisasi membawa manfaat nyata bagi efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan keimigrasian.

KESIMPULAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan aspek vital di lingkungan keimigrasian. Kini Pengelolaan BMN menghadapi tantangan serius berupa ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi nyata, keterlambatan pemeliharaan, serta potensi penyalahgunaan aset. Permasalahan ini menunjukkan bahwa tata kelola konvensional yang masih mengandalkan pencatatan manual dan apel fisik belum cukup menjawab kompleksitas kebutuhan organisasi modern. Integrasi teknologi informasi hadir sebagai solusi strategis yang tidak hanya meningkatkan efisiensi inventarisasi dan pemanfaatan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik.

Melalui pemanfaatan aplikasi resmi pemerintah seperti SIMAK-BMN dan SAKTI, ditambah penerapan inovasi teknis seperti GPS tracking, QR/Barcode, serta dashboard monitoring, pengelolaan aset negara dapat dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan terukur. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas data awal, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur jaringan, serta komitmen manajerial. Oleh karena itu, strategi implementasi harus bersifat bertahap, dimulai dari rekonsiliasi data, penguatan SOP, pelatihan pegawai, hingga pilot project sebelum diterapkan secara luas di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dengan demikian, integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan BMN di lingkungan keimigrasian bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk mewujudkan good governance dan pelayanan publik yang berkualitas. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai kementerian baru yang bertransformasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta instansi terkait dalam merumuskan kebijakan dan

program penguatan tata kelola aset negara. Penelitian lanjutan berbasis data lapangan tetap diperlukan untuk menguji secara empiris dampak digitalisasi terhadap efisiensi biaya, pemanfaatan aset, serta kepuasan layanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2023). *Laporan Tahunan DJKN 2022*. Kementerian Keuangan RI. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). *SAKTI: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/medan1/id/sakti/mengenal-sakti/overview-sakti-web.html>
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Apel Kendaraan Dinas di Lingkungan Kemenkumham*. <https://kepri.kemenkum.go.id/berita-utama/optimalikan-pengawasan-dalam-pemanfaatan-bmn-kanwil-hukum-kepri-selenggarakan-apel-kendaraan-dinas>
RRI. (2024). *BPK Temukan 840 Kendaraan Dinas Tidak Jelas di Pemkot Bekasi*. <https://rri.co.id/daerah/868500/ratusan-kendaraan-dinas-pemkot-bekasi-dilaporkan-raib>
Kementerian PANRB. (2022). *Indeks SPBE Nasional 2022*. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/indeks-spbe-nasional-meningkat-menteri-rini-penguatan-integrasi-pelayanan-publik-berbasis-digital?>
Setiawan, B. & Nugroho, A. (2021). Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Manajemen Aset Negara*, 7(2), 42-59.
Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Rohman, A. (2021). Penguatan tata kelola Barang Milik Negara melalui digitalisasi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Aset Negara*, 3(1), 55–67.
OECD. (2020). *Digital Government Review of Slovenia: Leading the Digital Transformation of the Public Sector*. OECD Digital Government Studies. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en>